

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF

DITERIMA

Agustus 2023

DIREVISI

September 2023

DISETUJUI

Oktober 2023

Israf Ilyas*, Ferry Prasetya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia.

Abstract: The background of this study is the high economic growth in East Java for the last 5 years, but it remains the highest number of Poverty Rate in Java Island. This study purpose is to examine the influence of government spending on education function, health function, and economic function as well as HDI as the main variables on the inclusive Economic Development Index (IPEI). With GDP Growth and poverty rate as control variables. This study use Panel Data Regression Method in 38 cities/regencies in East Java during 2017-2021. The results showed that spending on health function and HDI had a significant positive effects on Inclusive economic growth. While spending on education & economic function had a positive yet insignificant effect on Inclusive economic growth.

Keywords: Government Spending; Inclusive Economic Development Index; Human Development Index; Panel Data Regression

**INDEKSASI**

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**

Israf Ilyas

Email:

israfilyas@student.ub.ac.id

Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Brawijaya, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini dilandasi oleh tingginya Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir, namun tetap menjadi Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin paling tinggi di Pulau Jawa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta IPM sebagai variable utama terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Dengan tingkat Laju Pertumbuhan PDRB per kapita dan Tingkat Kemiskinan sebagai variable control. Penelitian ini menggunakan Metode Regresi Data Panel di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi Kesehatan serta IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPEI, selain itu belanja pemerintah fungsi pendidikan dan ekonomi berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap IPEI.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah; Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif; Indeks Pembangunan Manusia; Regresi Data Panel.

Cite this as:

Ilyas, I. & Prasetya, F. 2023. Pengaruh Belanja Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Journal of Development Economic and Social Studies. Volume 02, Number 4, Pages 910-919. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.16>

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan dengan tujuan mengadakan akses dan kesempatan yang luas dan merata untuk semua penduduk, mengurangi kesenjangan yang ada antar golongan maupun daerah, serta meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi inklusif harus dilaksanakan agar dapat mengurangi masalah ketimpangan tersebut. Pembangunan ekonomi Jawa Timur semakin meningkat sejalan dengan dinamika pembangunan itu sendiri mulai dari tahun 2017-2019. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya PDRB Jawa Timur dari 5,46% pada tahun 2017 meningkat di tahun 2019 menjadi 5,53%. Namun demikian, di tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan pandemic COVID-19 yang dialami semua daerah. Namun, ekonomi Jawa Timur kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 seiring dengan menurunnya COVID-19 di Jawa Timur. Jawa Timur merupakan penghasil perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan angka sebesar 25,01% dan penyumbang terbesar kedua secara nasional sebesar 14,48% hanya kalah dari DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. (Bappeda Jawa Timur, 2022)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan menjadi salah satu yang memiliki angka tertinggi di Pulau Jawa, hanya kalah dari DKI Jakarta. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin Jawa Timur menduduki peringkat pertama pada September 2021, dengan angka 4,25 juta jiwa. Diikuti dengan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin 4 juta jiwa, selanjutnya Jawa Tengah dengan jumlah 3,9 juta jiwa. Lalu, di Provinsi Banten dengan angka 852,28 ribu jiwa diikuti oleh DKI Jakarta dengan angka 498,29 ribu jiwa dan DI Yogyakarta dengan angka 474,49 ribu jiwa (Databoks, 2022). Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Pulau Jawa tahun 2021, Provinsi Jawa Timur sebesar 5,74% masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan angka 5,95%, Jawa Barat dengan angka 9,82%, DKI Jakarta 8,50% dan Banten dengan angka 8,98%. Hanya DI Yogyakarta yang memiliki persentase lebih baik dari pada Provinsi Jawa Timur dalam TPT tahun 2021 dengan angka 4,56% (BPS Provinsi Jawa Timur, 2023).

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya, hanya pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang disebabkan pandemic COVID-19, akan tetapi Indeks Gini dari Provinsi Jawa Timur tidak mengalami banyak perubahan, terutama pada tahun 2019-2021, Indeks Gini Jawa Timur tetap sama di angka 0,364 setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan meskipun terjadi kenaikan dalam perekonomian di Jawa Timur, hal ini tidak berarti secara otomatis mengurangi tingkat ketimpangan yang ada. Selain itu, menurut data dari BPS Jawa Timur (2023), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari 3,82 pada tahun 2019 ke 5,84 pada tahun 2020 dan mengalami penurunan kembali menjadi 5,74 pada tahun 2021. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur juga terjadi peningkatan dari 10,20 pada tahun 2019 menjadi 11,46 pada tahun 2020 dan kembali turun menjadi 10,59 pada tahun 2021. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur bisa dikatakan belum maksimal dan masih terdapat ketimpangan yang terjadi antar daerah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang terjadi di Jawa Timur belum terjadi sepenuhnya, terutama di daerah kabupaten/kota.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hasil. Salah satu hasil penelitian mengatakan belanja Kesehatan mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap GDP di Amerika Serikat Raghupathi & Raghupathi (2020). Arrfah & Trisakti (2022) juga menyimpulkan variable belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Berbeda dengan Faizin & Prabowo (2023) yang menyatakan bahwa belanja fungsi kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap PEI Aspek Pertumbuhan dan belanja fungsi pendidikan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Aspek Pertumbuhan. Selain itu, penelitian serupa pernah pula dilakukan di Provinsi Jawa Timur oleh Safitri (2021) dengan periode waktu tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dan juga pendidikan berdampak positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Namun, keadaan ekonomi saat

itu berbeda dengan periode yang diteliti pada penelitian ini, karena pada saat itu belum terjadi pandemi COVID-19 yang mengubah perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meneliti pengaruh belanja pemerintah daerah yang berupa belanja fungsi kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengadopsi penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pengeluaran Pemerintah

Dalam N. Gregory Mankiw (2012), Adolf Wagner menjelaskan bahwasanya belanja serta kebijakan pemerintah berkembang dari waktu ke waktu. Peran negara yang semakin meluas dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan merupakan inti dari teorinya. Wagner menjelaskan bahwa dalam ekonomi di mana untuk setiap peningkatan pendapatan, pengeluaran pemerintah juga ikut meningkat secara proporsional, hal ini karena negara perlu mengelola hubungan yang terjadi di mata publik, hukum, sekolah, hiburan, budaya, dan sebagainya. Belanja pemerintah meningkat karena berbagai alasan, termasuk perluasan kegiatan dan pembangunan perbankan, perluasan fungsi kesejahteraan, dan perluasan fungsi pertahanan dan keamanan, menurut teori Wagner. "*Organic Theory of State*", yang beranggapan bahwa pemerintah merupakan individu dengan kebebasan untuk bertindak secara independen dari masyarakat lain, adalah dasar dari teori Wagner (Mankiw, 2012).

Pembangunan Ekonomi Inklusif

IDDC (*International Disability and Development Consortium*) mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai proses untuk memastikan semua golongan yang kurang terwakili secara sosial dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Kanbur & Rauniyar (2010) mengatakan bahwa perbaikan bersifat menyeluruh ketika semua warga ikut serta dan penyampaian sesuai dengan siklusnya, apapun kondisinya atau pondasi individunya.

Warsilah (2015) melakukan penelitian tentang pembangunan ekonomi inklusif. Me-

nurut temuannya, strategi pembangunan inklusif merupakan komponen implementasi strategi berbasis aspek sosial pembangunan dan respon untuk mengurangi marginalisasi. manajemen pembangunan yang buruk juga, berdasarkan gagasan bahwa pertumbuhan atau kemajuan ekonomi murni harus menjadi tujuan. Dengan melibatkan warga kota dalam proses pembangunan kota, penelitiannya di Solo menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan partisipatif dapat mengurangi eksklusivitas sosial dan mendorong inklusi sosial.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Besaran indeks menentukan apakah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara bersifat inklusif atau tidak inklusif. Pada level kabupaten/kota, provinsi dan negara pembangunan inklusif Indonesia dapat diukur dan dilacak menggunakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Inclusive Growth Index* (IGI) dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai kegiatan pembangunan. Melalui pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, akses dan peluang, IPEI mengukur tingkat inklusif pembangunan Indonesia. Indeks pembangunan ekonomi inklusif terdiri dari 21 indikator dan dibagi menjadi tiga kolom dengan delapan subkolom (Bappenas, 2023).

Pilar I

Pilar I dalam IPEI meliputi Perkembangan serta Pertumbuhan ekonomi, yang mana terdapat 3 sub pilar, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi mencakup 3 indikator.
2. Kesempatan kerja mencakup 3 indikator, dan
3. Infrastruktur ekonomi mencakup 3 indikator.

Pilar II

Pilar II dalam IPEI meliputi pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, yang mana terdapat 2 sub pilar, yaitu:

1. Ketimpangan yang mencakup 3 indikator.
2. Kemiskinan yang mencakup 2 indikator.

Pilar III

Pilar III dalam IPEI meliputi perluasan akses serta peluang yang mana terdapat 3 sub pilar, yaitu:

1. Kapabilitas manusia yang mencakup 3 indikator.
2. Infrastruktur dasar yang mencakup 2 indikator.
3. Keuangan inklusif yang mencakup 2 indikator.

Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan ukuran komparatif harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menerangkan bagaimana pendapatan penduduk, perawatan kesehatan, dan pendidikan. dapat mengarah pada hasil pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara teratur dimasukkan dalam Laporan Pembangunan Manusia (LPM) setiap tahun sejak diadopsi pada tahun 1990 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPPBB). IPM merupakan alat ukur untuk dampak yang dihasilkan oleh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan untuk menentukan apakah suatu negara tergolong sebagai Negara yang maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.

Berdasarkan sejumlah aspek mendasar dari kualitas hidup, IPM mengukur pembangunan manusia. IPM dibuat dengan menggunakan pendekatan dasar tiga dimensi sebagai ukuran kualitas hidup. Pengetahuan, kehidupan yang layak, serta umur panjang dan sehat adalah bagian dari dimensi ini. Ketiga aspek ini memiliki kepentingan yang sangat luas karena terkait dengan banyak variabel. angka harapan hidup saat digunakan untuk mengukur aspek kesejahteraan. Dimensi pengetahuan juga diukur dengan menggunakan kombinasi indikator literasi dan rata-rata lama bersekolah. Pengeluaran rata-rata per kapita, yang diambil sebagai pendekatan pendapatan dan merupakan pencapaian pembangunan kehidupan yang layak, merupakan salah satu ukuran daya beli masyarakat terhadap beberapa kebutuhan dasar yang dipakai untuk mendapatkan tolak ukur hidup yang layak.

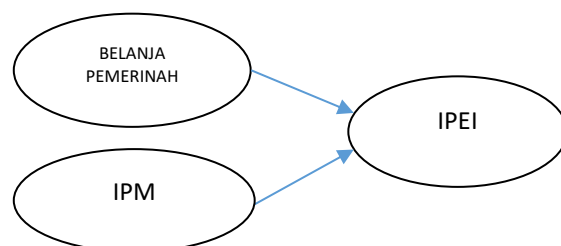
Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang melayani kepentingan bersama,

untuk merangsang ekonomi daerah dan meningkatkan fungsi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, belanja negara dibagi menurut organisasi, kegiatan, dan jenis belanja. Informasi khusus organisasi tentang pengeluaran pemerintah disesuaikan dengan komposisi departemen/instansi. Rincian pengeluaran pemerintah menurut fungsi terdapat 11 fungsi, yakni: pertahanan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup dan ruang publik, kesehatan, budaya dan pariwisata, agama, perlindungan sosial dan pendidikan.

Selain itu, belanja pegawai, belanja komoditas, belanja modal, bunga hutang, subsidi, belanja bantuan, tunjangan pendapatan, dan pengeluaran lainnya membentuk perincian belanja pemerintah menurut jenisnya. Selain itu, rincian belanja pemerintah per kapabilitas yang terdiri dari 11 kapabilitas dan 69 sub kapabilitas merupakan impresi program dari struktur sebelumnya yang pasti per wilayah dan sub-wilayah. Pengelompokan program kementerian dan lembaga pemerintah menurut fungsi (dan subfungsi) hanyalah alat untuk menganalisis fungsi yang telah, akan, dan akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan standar internasional. Praktik yang baik Klasifikasi Fungsi Pemerintah (COFOG), yang dikembangkan oleh UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan diadopsi dalam Manual Statistik Ekonomi Pemerintah (GFS) pada tahun 2001, digunakan untuk mengklasifikasikan kegiatan dalam sistem anggaran Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Anggaran (2014), IMF (*International Monetary Fund*), melalui kecil perubahan yang memisahkan manfaat religi melalui manfaat budaya, rekreasi, serta religi. (Ditjen Anggaran, 2014).

Kerangka pikir penelitian



Penelitian Terdahulu

Menurut temuan penelitian Arrfah dan Syafri (2022), variable belanja fungsi kesehatan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan, namun variabel belanja pada fungsi pendidikan memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan. Hal ini menerangkan bahwa belanja pada fungsi kesehatan berdampak lebih besar pada pertumbuhan inklusif dibandingkan belanja pada fungsi pendidikan. Purwanti & Rahmawati (2021) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwasanya belanja fungsi pendidikan dan kesehatan mempunyai dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Sri Hartati (2021) Menurut temuan studinya, faktor belanja pendidikan dan kesehatan di pihak pemerintah berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Menurut penelitian Fitrianasari (2021), terjadi pengaruh yang positif dan signifikan antara variable pengeluaran untuk pelayanan kesehatan dan kesempatan pendidikan dengan indeks pembangunan ekonomi inklusif. Sihombing (2023) juga melaksanakan pengkajian yang serupa, dan temuan menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan untuk fungsi pendidikan dan perawatan kesehatan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPEI.

Menurut penelitian Yasni & Muhammad (2020), belanja fungsi pendidikan tidak signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Dan sehubungan dengan fungsi kesehatan, belanja pemerintah jangka pendek maupun jangka panjang memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. Safitri (2021) menjelaskan bahwasanya pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dan juga pendidikan berdampak positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif, maupun itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Ehekoba & Chinelo (2017) melalui penelitian yang dilakukan menerangkan bahwasanya belanja fungsi pendidikan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap pertumbuhan, tetapi belanja fungsi kesehatan memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan pada perkembangan. Menurut Prakoso & Agustina (2022), faktor belanja fungsi kesehatan dan juga pendidikan berpengaruh positif

terhadap IPEI, walaupun pengaruh ini tidak signifikan. Sedangkan Faizin & Prabowo (2023) pengeluaran yang dilakukan pada fungsi kesehatan tidak berdampak pada Aspek Pertumbuhan PEI. Sedangkan belanja untuk pendidikan berdampak negatif pada PEI aspek pertumbuhan.

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, penulis mengembangkan beberapa hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1, Belanja pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI.

Hipotesis 2, Belanja pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI.

Hipotesis 3, Belanja pemerintah fungsi ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI.

Hipotesis 4, Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur dalam periode waktu 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data tahunan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Data IPEI kabupaten dan kota di Jawa Timur didapatkan dari Bappenas (2023). Untuk data realisasi belanja fungsi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan didapatkan dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (2023), Data Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan didapat dari Bappeda Jawa Timur (2022) serta data Laju pertumbuhan PDRB per Kapita didapat dari BPS Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah Metode Regresi Data Panel.

HASIL ANALISIS

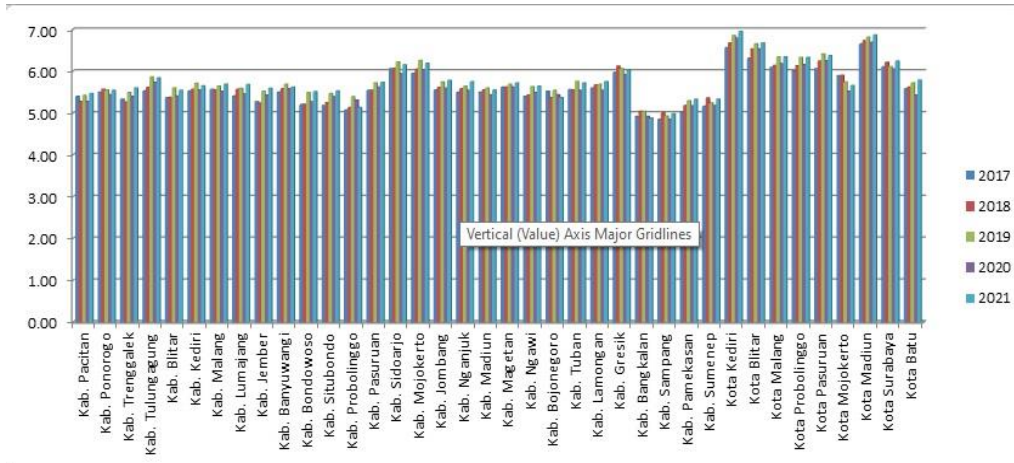
Analisis Deskriptif

Perkembangan IPEI di Provinsi Jawa Timur baik dalam lingkup kabupaten maupun kota dalam kurun waktu 2017-2021 sebagian besar sudah memiliki angka IPEI yang memuaskan. Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai IPEI di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Hanya saja, pada tahun 2020 semua kabupaten/kota mengalami penurunan nilai IPEI yang merupakan salah satu dampak dari

pandemi COVID-19. Akan tetapi, nilai IPEI kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan pada sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Timur.

Dari grafik dibawah, dapat diperoleh nilai rata-rata IPEI di kabupaten dan kota di

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 adalah 5,78 yang mana sudah berada pada kategori memuaskan. Adapun pada tahun 2021, Kota Kediri memiliki nilai IPEI tertinggi dengan angka 6,95 sedangkan nilai IPEI terendah adalah kabupaten bangkalan dengan angka IPEI 4,88.



Sumber: Bappenas (Diolah)

Pengujian Pemilihan Model

Tabel 2. Uji Chow & Hausman

	Statistic	d.f.	Prob.
Uji Chow	400.905052	37	0.0000
Uji Hausman	15.352358	6	0.0177

Sumber: Output Eviews (diolah)

Uji Chow, Uji *Lagrange Multiplier* dan Uji Hausman dilakukan untuk menemukan model penelitian yang paling menjanjikan. Program Eviews 12 digunakan untuk pengujian.

Berdasarkan hasil uji Chow dapat dilihat bahwa nilai statistic *Cross-section Chi-square* sebesar 400.905052 dengan nilai Probabilitasnya 0,0000. Karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka Fixed Effect Model adalah model terbaik yang terpilih.

Selanjutnya, karena pada hasil Chow Fixed Effect Model terpilih, selanjutnya dilakukan Hausman Test untuk mencari model yang terbaik antara REM dan FEM.

Berdasarkan hasil dari Hausman Test, nilai statistik *Cross-section Chi-square* sebesar 15,352358 dengan nilai Probabilitas 0,0177. Nilai probabilitasnya lebih rendah dari 0,05 (0,0177<0,05), *Fixed* Efek Model dipilih untuk

mewakili data. Maka, model terbaik yang terpilih atas dasar hasil uji yang telah dilakukan adalah *Fixed Effect Model*.

Pengujian Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan bahwa FEM (*Fixed Effect Model*) merupakan model yang terbaik, maka selanjutnya harus dilaksanakan uji asumsi klasik dimana uji yang akan dilakukan adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Setelah dilakukan uji multikolinieritas, diperoleh hasil nilai korelasi antar variabel bebas yaitu belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi, IPM, angka kemiskinan, dan laju pertumbuhan PDRB per kapita, semuanya menunjukkan hasil kurang dari 0,80 (0,80). Hasil tersebut diperoleh setelah dilakukan uji multikolinieritas. Maka, tidak terjadi masalah multikolinieritas antara variabel independen.

Setelah dilakukan uji heteroskedastisitas, hasil yang diperoleh adalah nilai probabilitas seluruh variable bebas lebih tinggi dari 0,05. Maka, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil Estimasi

Tabel 3. Ringkasan Output FEM

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	-4.062001	3.071086	1.322660	0.1880
LOGX1 (PEND)	0.084236	0.111810	0.753380	0.4524
LOGX2 (KES)	0.101428	0.049282	2.058129	0.0414
LOGX3 (EKO)	0.001597	0.015578	0.102527	0.9185
X4 (IPM)	0.070877	0.015223	4.655940	0.0000
X5 (TK)	-0.032860	0.011749	2.796957	0.0059
X6 (LPP)	0.010754	0.001655	6.497701	0.0000
F-statistic	133.2559			
Prob (F-statistic)	0.000000			
Adjusted R-squared	0.967835			

Sumber: Output Eviews (diolah)

Dari data hasil estimasi yang dilakukan, persamaan regresi data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IPEI = -4.062 + 0.084X1 + 0.101X2 + 0.0016X3 + 0.071X4 - 0.033X5 + 0.011X6$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dijelaskan:

- koefisien regresi X1 berangka positif sebesar 0.084. ini menjelaskan jika X1 meningkat maka IPEI akan naik sebanyak 0.084 melalui pandangan variable lainya konstan.
- Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,101 merupakan bilangan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan X2 akan menghasilkan peningkatan IPEI sebesar 0,101 poin, dengan asumsi semua variabel lainnya tetap.
- Nilai positif 0,0016 diberikan pada koefisien regresi yang dilambangkan dengan X3. Hal ini menunjukkan bahwa jika X3 dinaikkan, akan terjadi kenaikan IPEI

sebesar 0,0016 asalkan semua variabel lainnya tetap sama.

- Nilai koefisien regresi X4 sebesar 0,071 merupakan bilangan positif. Apabila semua variable lainnya konstan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan X4 akan menghasilkan kenaikan IPEI sebesar 0,071 poin.
- Nilai koefisien regresi X5 sebesar -0.033. hal ini menunjukkan apabila terjadi penurunan pada X5 maka akan meningkatkan IPEI sebesar 0.033 dengan asumsi variable lain konstan.
- Nilai koefisien regresi X6 sebesar 0.011. hal ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan pada X6 akan meningkatkan IPEI sebesar 0.011 dengan asumsi variable lain konstan.
- Selain itu, berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil Prob(F-statistik) 0,000000. Ini menjelaskan bahwa nilainya tidak melebihi tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 semuanya berpengaruh pada IPEI secara simultan.
- Menurut hasil uji t parsial, variable X2 dan X4 berpengaruh positif yang signifikan terhadap IPEI. Selain itu, IPEI dipengaruhi secara positif oleh faktor X1 dan X3, meskipun pengaruh ini tidak signifikan.
- Selain itu, menurut hasil estimasi, didapat angka adjusted R-squared sebesar 0.967835 menandakan variabel-variabel independen mampu menerangkan dampak pada variabel dependen sebesar 96.78%. Dan selebihnya 3.22% diuraikan oleh variable-variabel lainnya diluar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Variabel Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan menunjukkan hasil yang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPEI dengan koefisien regresi bernilai 0.084. hal ini menunjukkan apabila Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan terjadi peningkatan maka IPEI juga meningkat 0.084 dengan anggapan variable lain tetap. Pengaruh ini tidak sejalan dengan penelitian Hartati (2021) dan Fitrianasari (2021), yang mana keduanya sama-sama memiliki hasil IPEI dipengaruhi secara positif

dan signifikan oleh belanja pemerintah aspek pendidikan. Belanja pemerintah fungsi pendidikan masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal karena menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan adalah salah satu faktor penting untuk menunjang pembangunan suatu negara. Pendidikan adalah salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM berawal dari bangku pendidikan yang baik dan memadai. Dengan tercapainya kualitas SDM yang lebih baik maka akan makin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan berpengaruh juga kepada indeks pembangunan ekonomi inklusif kedepannya. Maka dari itu, belanja pemerintah fungsi pendidikan memiliki anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dari yang lainnya.

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Variable Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan menunjukkan hasil yang berpengaruh positif yang signifikan pada IPEI dengan koefisien regresi berangka 0.101. hal ini menunjukkan apabila Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan meningkat maka IPEI cenderung naik sebanyak 0.101 melalui anggapan variabel lainnya konstan. Pengaruh tersebut sejalan pada penelitian yang dilaksanakan Arrfah & Syafri (2022) dan Sihombing (2023), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi kesehatan memiliki dampak positif yang signifikan pada IPEI.

Hal ini sejalan dengan Teori Wagner yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah meningkat karena adanya interaksi dalam masyarakat melalui perbaikan tingkat kesehatan. Kesehatan merupakan elemen penting untuk menuju kearah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tujuan pembangunan di bidang kesehatan ialah untuk meningkatkan kemauan, kemampuan, dan kesadaran yang dimiliki setiap individu untuk hidup sehat. Dengan demikian diharapkan tingkat kesehatan masyarakat secara umum akan meningkat, dan diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Belanja Fungsi Ekonomi menunjukkan hasil yang berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan kepada IPEI melalui koefisien regresi bernilai 0.0016. hal ini menunjukkan apabila Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi meningkat maka IPEI bisa naik sebanyak 0.0016 melalui tanggapan variable lainnya tetap. Pengaruh ini bertentangan dengan hasil yang diperoleh Faizin & Prabowo (2022) yang mana PEI aspek pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh belanja fungsi ekonomi. Sedangkan menurut Safitri (2021) dalam jangka panjang IPEI dipengaruhi oleh belanja fungsi ekonomi secara positif dan signifikan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa belanja pemerintah fungsi ekonomi belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Salah satu bentuk belanja pemerintah fungsi ekonomi yaitu infrastruktur. Agar manfaat dari belanja pemerintah fungsi ekonomi dapat lebih dirasakan oleh masyarakat luas, sebaiknya difokuskan salah satunya kepada pembangunan infrastruktur yang kegunaannya bisa dinikmati secara langsung ataupun dalam jangka panjang oleh masyarakat luas. Pembangunan dari infrastruktur itu sendiri sudah pasti memerlukan tenaga kerja lebih yang akan membuka lahan pekerjaan baru yang pada akhirnya akan berdampak kepada pembangunan ekonomi yang inklusif.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Variabel IPM memiliki hasil estimasi yang berdampak positif yang signifikan pada IPEI dengan koefisien regresi bernilai 0.071. hal tersebut menerangkan apabila IPM meningkat akan meningkatkan IPEI sebesar 0.071 melalui anggapan variable lain tetap. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fitrianasari (2021) dan Lestari & Rahmawati (2021) yang menjelaskan bahwa IPM mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap IPEI.

Modal manusia adalah salah hal terpenting untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. Semakin tinggi kualitas manusianya maka meningkat tinggi pula level kemakmuran yang dapat dicapai. melalui meningkatnya keunggulan manusia maka dapat mengurangi

berbagai masalah ekonomi yang sering terjadi disuatu Negara seperti kemiskinan dan pengangguran. Seiring dengan berjalannya waktu, meningkatnya teknologi, maka semakin dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk menyeimbangi peningkatan teknologi itu sendiri. Maka dari itu, IPM sangat berpengaruh dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilaksanakan dapat diambil garis besar bahwasanya nilai Indeks Pengembangan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 memiliki nilai yang tinggi. Selain itu, dalam kurun waktu tersebut, nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Timur selalu melampaui nilai indeks nasional.

Mengenai faktor-faktor yang diteliti, ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif secara signifikan dipengaruhi oleh Variabel Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan dan IPM. Sementara itu, Variabel Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan dan Fungsi Ekonomi sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap IPEI, namun pengaruh tersebut tidak signifikan.

SARAN

Pemerintah dalam hal kebijakan harus mampu memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Pemerintah sebaiknya selain meningkatkan kuantitas atau nominal dari belanja pemerintah, juga harus lebih memikirkan sisi kualitas berupa tingkat ketepatan dalam menyalurkan belanja tersebut. Peningkatan kualitas SDM juga merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan lebih baik lagi karena berpengaruh terhadap segala macam aspek untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif.

IMPLIKASI

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas bahwa belanja pemerintah fungsi kesehatan dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah dapat memaksimalkan belanja fungsi kesehatan dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana dan juga jumlah tenaga medis

agar tingkat kesehatan masyarakat semakin meningkat yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Selain itu, belanja fungsi pendidikan dan fungsi ekonomi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja tersebut. Pemerintah dapat lebih memperhatikan daerah-daerah yang masih tertinggal dalam segi perekonomian maupun pendidikan sehingga dapat terjadi pemerataan yang lebih baik untuk menuju kearah pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini terbatas pada penggunaan variable independen berupa belanja pemerintah fungsi terkait dan juga indeks pembangunan manusia. Sedangkan masih banyak variable-variabel lain yang dapat mempengaruhi variable dependen yaitu indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan penggunaan metode lain untuk mengetahui pengaruh variable yang diteliti terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrfah, A. P., & Trisakti, U. (2022). *Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Bappeda Jawa Timur. (2022). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran Provinsi Jawa Timur. <https://bappeda.jatimprov.go.id/>
- Bappenas. (2023). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. <https://inklusi.bappenas.go.id/data>
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). <https://jatim.bps.go.id/>
- Databoks. (2022). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/ini-provinsi-dengan-penduduk-miskin-terbanyak-di-pulau-jawa>

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. (2023). <https://djpk.kemkeu.go.id/?p=5412>
- Echekoba, F. N., & Chinelo, A. I. (2017). The Impact of Government Expenditure on Nigeria Economic Growth: A Further Disaggregated Approach. *NG-Journal of Social Development*, 6(3), 34–48. <https://doi.org/10.12816/0038069>
- Faizin, M. A., & Prabowo, P. S. (2023). Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar 1 di Provinsi Jawa Tengah. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 69–78. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.49282>
- Fitrianasari, R. N. (2021). *Analisis Dampak Globalisasi, Kebijakan Fiskal, Dan Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Kasus Dengan Data Panel Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur*. 2.
- Kanbur, R., & Rauniyar, G. (2010). Conceptualizing inclusive development: With applications to rural infrastructure and development assistance. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(4), 437–454. <https://doi.org/10.1080/13547860.2010.516163>
- Lestari, C. D., & Rahmawati, F. (2021). *Analisis Pengaruh Teknologi, Politik, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2017-2019*.
- Mankiw, N. G. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat.
- Prakoso, A. D., & Agustina, N. (2022). Inclusive Growth Analysis in Central Sulawesi, The Eastern Province of Indonesia 2015-2019. *Asian Journal of Business Environment*, 12(2), 1–12. <https://doi.org/10.13106/AJBE.2022.VOL12.NO2.1>
- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia*.
- Raghupathi, V., & Raghupathi, W. (2020). Healthcare Expenditure and Economic Performance: Insights From the United States Data. *Frontiers in Public Health*, 8, 156. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00156>
- Safitri, M. I. D. (2021). *Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur*.
- Sihombing, P. R., Arsani, A. M., & Purwanti, D. (2023). *Apakah Fungsi Belanja APBD Dan Dana Desa Mempengaruhi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia?* 3(1).
- Sri Hartati, Y. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>
- Warsilah, H. (2015). *Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah*. 17(2).
- Yasni, R., & Muhammad, F. I. (2020). *Peranan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Dan Perumahan Bagi Perekonomian Indonesia*.